

**Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus)  
dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Burengan  
Kota Kediri**

**Daniel Wahyu Triatmojo<sup>1</sup>, Bayu Priambodo<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>UPN “Veteran” Jawa Timur

danielwahyutriatmojo@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to evaluate and describe the Prodamas Plus program in improving community income in Burengan Village, Kediri City. Using a descriptive qualitative approach, the research assesses the program based on six evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The findings indicate that Prodamas Plus is effective in fulfilling basic community needs, particularly in infrastructure development and public facilities, yet it has not optimally improved community income due to limited community capacity and the lack of sustainable post-training assistance. In terms of efficiency, program governance is well-structured, but implementation in the field is constrained by tight execution timelines and high administrative burdens. Program adequacy is strong at the basic level but remains insufficient in economic empowerment efforts. Equity in access to development has been achieved, although equality in economic outcomes is still uneven among residents. The program demonstrates high responsiveness through various public participation channels and service mechanisms that accommodate community aspirations. Accuracy is reflected in the program's alignment with infrastructure needs but is not yet fully evident in generating significant income improvements. Overall, Prodamas Plus has successfully enhanced environmental quality and public services; however, stronger economic empowerment strategies are required to ensure more optimal and sustainable contributions to the income of Burengan residents.*

**Keywords:** *Prodamas Plus, community empowerment, community income, policy evaluation*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan program Prodamas Plus ini dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan Kota Kediri. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi Prodamas Plus melalui 6 kriteria evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prodamas Plus efektif dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama di bidang infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi belum optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena terbatasnya kapasitas warga dan kurangnya pendampingan lanjutan. Dari aspek efisiensi, tata kelola program berjalan baik, tetapi implementasi di lapangan masih terkendala waktu pelaksanaan yang mepet dan beban administrasi yang tinggi. Kecukupan program kuat pada level dasar tetapi belum memadai dalam pemberdayaan ekonomi. Kesamaan akses terhadap pembangunan telah tercapai, namun kesetaraan hasil ekonomi belum merata antarwarga. Responsivitas pemerintah tergolong tinggi melalui berbagai kanal aspirasi dan mekanisme layanan publik yang mendukung partisipasi masyarakat. Ketepatan program dinilai baik dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi belum sepenuhnya tepat dalam menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Secara keseluruhan, Prodamas Plus berhasil memperbaiki

kualitas lingkungan dan layanan masyarakat, namun masih memerlukan penguatan strategi pemberdayaan ekonomi agar kontribusi terhadap pendapatan warga Burengan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Prodamas Plus, pemberdayaan masyarakat, pendapatan masyarakat, evaluasi kebijakan

## **PENDAHULUAN**

Selama bertahun-tahun, ekonomi Kota Kediri sangat bergantung pada industri besar, khususnya industri kretek. Struktur PDRB Kota Kediri kebanyakan ditopang oleh perusahaan besar seperti PT Gudang Garam Tbk, yang menyumbang hampir 70% dari struktur ekonomi kota, sehingga Kota Kediri dikenal sebagai "kota terkaya" kedua di Indonesia setelah Jakarta Pusat, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi di Kota Kediri menjadikan diversifikasi ekonomi sebagai tantangan besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca-pandemi, terjadi pergeseran arah pembangunan ekonomi ke arah yang lebih majemuk. Pemerintah Kota Kediri mulai mendorong diversifikasi ekonomi, antara lain melalui penguatan sektor UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui program seperti Prodamas (Pemerintah Kota Kediri, 2022).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri menggagas sebuah inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Program ini dijalankan di tingkat kelurahan, dengan Rukun Tetangga (RT) sebagai pelaksana utama, dan berada di bawah koordinasi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kediri. Prodamas pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari komitmen politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Mas Abu dan Ning Lik, saat kampanye Pilkada tahun 2013. Program ini hadir sebagai respons terhadap belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Kediri (Ussyifa, 2023). Pemerintah Kota Kediri merancang Prodamas sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan yang bersifat partisipatif, dan melibatkan peran aktif masyarakat. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi pemberdayaan guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari Prodamas yang dilihat dari Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 adalah memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lokal. Program ini mulai diimplementasikan pada tahun 2015 dan berlangsung hingga 2019.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuarita dan Irene (2021) dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri kemudian meningkatkan alokasi anggaran Prodamas menjadi Rp100 juta per RT setiap tahun melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus atau yang dikenal dengan Prodamas Plus. Program ini sejatinya direncanakan mulai berjalan pada tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19, sebagian besar dana dialihkan untuk penanganan wabah tersebut sehingga

pelaksanaannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pelaksanaan Prodamas Plus tahun 2022 diatur melalui Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prodamas Plus Tahun 2022. Sehingga Prodamas ini kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2021 dengan format baru, yaitu Prodamas Plus (Program Pemberdayaan Masyarakat Plus) (Yulistya & Rahaju, 2023).

**Tabel 1 Perubahan Prodamas menjadi Prodamas Plus**

No	Poin Perbedaan	Kegiatan	
		Prodamas (Rp. 50 Juta/RT)	Prodamas Plus (Rp. 100 Juta/RT)
1.	<b>Cakupan Bidang</b>	1. Infrastruktur 2. Sosial Budaya 3. Ekonomi	1. Infrastruktur 2. Sosial Budaya 3. Ekonomi 4. Kesehatan 5. Pendidikan 6. Kepemudaan
2.	<b>Sistem Pengadaan</b>	Swakelola Tipe I (dilaksanakan oleh Kelurahan)	Swakelola Tipe IV (dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat/Pokmas)
3.	<b>Usulan Kegiatan</b>	Murni usulan masyarakat	Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dimandatori oleh Pemkot Kediri
4.	<b>Penempatan Anggaran</b>	Seluruh anggaran berada pada DPA kelurahan	Beberapa jenis kegiatan yang dimandatori maka anggarannya berada di Perangkat Daerah terkait dan dikelola oleh mereka
5.	<b>Pendampingan</b>	Tenaga Pendamping dikontrak kelurahan dan menjadi bagian Tim Swakelola Kelurahan, yaitu sebagai anggota Tim Perencanaan	Kegiatan Pendampingan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat PTN

Sumber: Website Prodamas Plus 2025

Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) yang terbaru diatur dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2023, yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan Prodamas Plus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Jika dilihat dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2023 sesuai tabel diatas, terdapat enam poin perbedaan utama dari

Prodamas, yaitu meliputi besaran anggaran, ruang lingkup bidang, mekanisme pengadaan, proses pengusulan kegiatan, lokasi penganggaran, serta bentuk pendampingan. Dana yang diberikan pun mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp50 juta per RT menjadi Rp100 juta per RT. Cakupan bidang Prodamas awalnya mencakup tiga bidang, yaitu infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara itu, Prodamas Plus memperluas cakupan menjadi enam bidang, dengan menambahkan pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Perluasan ini memungkinkan program untuk menyentuh lebih banyak aspek kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2023, Pada Prodamas Plus pengelolaan program langsung dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan. Usulan kegiatan pada Prodamas sepenuhnya berasal dari masyarakat, namun pada Prodamas Plus terdapat beberapa kegiatan yang diwajibkan atau ditugaskan oleh Pemerintah Kota Kediri, meskipun prioritas tetap diberikan pada usulan masyarakat. Selain itu, pada Prodamas seluruh anggaran dialokasikan langsung ke kelurahan, sedangkan pada Prodamas Plus dana disalurkan kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab atas beberapa kegiatan dan mengelola anggaran tersebut. Hal ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Untuk pendampingan, Prodamas menggunakan tenaga yang dikontrak oleh kelurahan, sementara pada Prodamas Plus pendampingan dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan melibatkan LPM dan PTN, diharapkan pendampingan yang diberikan lebih berkualitas dan berbasis pada pengetahuan serta pengalaman yang relevan. Sehingga program ini berjalan dimulai dari tingkat RT dengan membuat proposal usulan yang diserahkan ke kelurahan sampai kecamatan dan kota yang selanjutnya akan ditangani langsung oleh BAPPEDA.

Dalam konteks tersebut, Kelurahan Burengan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kelurahan yang dinilai aktif, berprestasi, dan memiliki capaian signifikan dalam pelaksanaan Prodamas Plus. Burengan pernah meraih juara di ajang Prodamas Plus Award dan diakui sebagai salah satu kelurahan dengan manajemen program yang baik. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana Prodamas Plus dalam konteks Burengan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama karena program ini masih relatif baru dan baru terealisasi penuh sejak 2021. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan enam kriteria utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif, baik dari sisi proses implementasi maupun hasil yang dicapai. Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Prodamas Plus dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn?”.

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pelaksanaan Prodamas Plus serta mengevaluasi sejauh mana program tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian (*research gap*) karena belum ada studi sebelumnya yang secara spesifik menilai dampak Prodamas Plus terhadap pendapatan pada level kelurahan tertentu. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan pemberdayaan berbasis komunitas dalam konteks pembangunan ekonomi lokal. Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam merumuskan strategi penguatan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran, terutama bagi sektor ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memotret hasil akhir dari program, tetapi juga menganalisis proses dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program. Hal ini menjadikan pendekatan teori evaluasi dari William N. Dunn sebagai pilihan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Teori Evaluasi William N. Dunn dan kriteria evaluasi inilah yang penulis jadikan acuan untuk mengkaji penelitian ini yang berjudul **“Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Burengan Kota Kediri.”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Menurut Sugiyono,(2023) bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan, Kota Kediri. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara holistik berdasarkan kondisi alami dan pengalaman langsung para informan. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi program berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Burengan karena wilayah ini merupakan salah satu kelurahan berprestasi dan dinilai aktif dalam pelaksanaan Prodamas Plus.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen, laporan, peraturan, jurnal, artikel, dan arsip terkait pelaksanaan program. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, melibatkan perangkat pemerintah, BAPPEDA, kecamatan, dan Ketua Pokmas sebagai pemangku kepentingan utama dalam implementasi program. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi merupakan bagian dari proses analisis sebuah kebijakan. Umumnya evaluasi digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai tujuan atau belum, dengan adanya proses evaluasi dari sebuah kebijakan dapat memungkinkan untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan kearah yang lebih baik terhadap sebuah kebijakan.

PRODAMAS PLUS adalah program lanjutan dari program fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dari Pemerintah Kota Kediri, yang dulu disebut dengan PRODAMAS, yang telah dilaksanakan mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019. Konsep pembangunan melalui PRODAMAS yang memerankan masyarakat sebagai subyek pembangunan dan pemerintah hanya sebagai fasilitator dinilai cukup berhasil, efektif, dan efisien pada kala itu, sehingga berhasil mempercepat dan pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Kota Kediri. Percepatan pembangunan ini bahkan dinilai 10 kali lebih cepat dibanding sebelum program ini ada, pemerataan pembangunan yang cepat ini dikarenakan massivenya kegiatan pembangunan di 1.478 RT se-Kota Kediri dengan total hampir 17.000 kegiatan per tahunnya.

### **Efektivitas**

Kriteria Efektivitas menurut teori evaluasi kebijakan William N Dunn (2003) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam penelitian ini, efektivitas yang dikehendaki adalah sejauh mana Program Prodamas Plus mampu mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kelurahan Burengan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pemerintah kota, Prodamas Plus dipandang telah berjalan cukup efektif. Bappeda menjelaskan bahwa sebelum adanya Prodamas dan Prodamas Plus, berbagai ide serta usulan masyarakat sering kali terhenti pada proses Musrenbang dan gagal direalisasikan karena tersisih oleh prioritas pembangunan daerah yang lebih besar. Dengan hadirnya Prodamas Plus, mekanisme penyaluran usulan masyarakat menjadi lebih langsung dan responsif, sehingga ide-ide yang sebelumnya sulit terealisasi dapat diwujudkan di tingkat RT dan kelurahan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara nyata program telah memenuhi aspek efektivitas menurut Dunn, yakni mampu mencapai tujuan kebijakan dalam memberikan hasil konkret yang dibutuhkan masyarakat. Efektivitas tersebut terutama terlihat pada percepatan pembangunan skala lingkungan yang berdampak pada peningkatan kenyamanan dan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Prodamas Plus memiliki tingkat efektivitas yang cukup baik dalam aspek pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas publik di Kelurahan Burengan. Mekanisme perencanaan *bottom-up* melalui rembug warga dan Muskel membuat berbagai usulan masyarakat dapat terealisasi lebih cepat dibandingkan sebelum adanya program. Pada level pemerintah kota,

kecamatan, dan kelurahan, program terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan lingkungan, meningkatkan kenyamanan warga, serta mendukung aktivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dasar.

Namun, efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat belum optimal. Pelatihan ekonomi yang diberikan belum sepenuhnya menghasilkan usaha produktif yang berkelanjutan. Keterbatasan kapasitas warga dalam menentukan prioritas kebutuhan, minimnya analisis ekonomi dalam penyusunan usulan, serta kurangnya pendampingan pascapelatihan menjadi faktor penghambat utama. Pokmas juga menilai efektivitas pemberdayaan ekonomi baru mencapai sekitar 50% karena output pelatihan belum berkembang menjadi outcome peningkatan pendapatan.

Dengan demikian, efektivitas Prodamas Plus dapat dikatakan kuat pada efektivitas procedural yakni dalam pelaksanaan, serapan anggaran, dan penyediaan fasilitas—tetapi masih lemah pada efektivitas substantif yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Program telah menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan lingkungan, tetapi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masih perlu diperkuat melalui pendampingan lanjutan dan peningkatan kapasitas warga.



**Gambar 1 Rembug warga Burengan**

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Kediri

## **Efisiensi**

Dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), efisiensi berkaitan dengan sejauh mana suatu program mampu menghasilkan tingkat efektivitas yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Artinya, efisiensi tidak hanya menilai pencapaian hasil, tetapi juga melihat perbandingan antara input dan output dalam pelaksanaan program. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila mampu mencapai dampak yang besar dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kecil atau terukur. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi Prodamas Plus dilihat dari bagaimana program mengelola sumber daya, baik anggaran Rp100 juta per RT, tenaga pelaksana, serta waktu pelaksanaan dalam mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Burengan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Prodamas Plus dinilai efisien karena mampu mempercepat proses pembangunan dan memangkas rantai birokrasi.

Mekanisme swakelola di tingkat kelurahan membuat usulan masyarakat lebih cepat direalisasikan dibandingkan proses Musrenbang yang panjang. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan juga menekan biaya pembangunan serta meningkatkan efisiensi sosial melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal. Pada tingkat kecamatan, efisiensi terlihat dari administrasi dan monitoring yang tertib serta pengalaman birokrasi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun sehingga pelaporan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Di tingkat kelurahan, penggunaan anggaran dilakukan dengan transparan dan didukung pendampingan teknis, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Pelibatan tenaga lokal memberikan manfaat ekonomi langsung, sehingga efisiensi tidak hanya terjadi pada aspek biaya, tetapi juga pada dampak sosial.

Namun, efisiensi waktu masih menjadi kendala utama. Keterlambatan pencairan dana menyebabkan kegiatan sering dilaksanakan pada akhir tahun dengan waktu yang sempit, sehingga mengurangi kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pokmas juga menilai bahwa waktu pelaksanaan yang terbatas masih menghambat optimalisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, Prodamas Plus telah efisien dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan swakelola, namun peningkatan efisiensi waktu masih dibutuhkan melalui percepatan pencairan anggaran dan perencanaan yang lebih matang agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai secara optimal.



**Gambar 2 Bentuk hasil kegiatan prodamas Plus**

Sumber: Dokumentasi Penulis

### **Kecukupan**

Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003), kecukupan (*adequacy*) diartikan sebagai sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab masalah inti yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Kecukupan tidak berhenti pada keberhasilan menghasilkan output kegiatan, tetapi menilai apakah hasil tersebut cukup untuk mengurangi, mengatasi, atau memecahkan masalah utama yang hendak diselesaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prodamas Plus dinilai cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada percepatan



pembangunan dan penyediaan layanan lingkungan. Di tingkat Kota Kediri, program dianggap mampu menyediakan fasilitas dasar secara cepat sehingga kebutuhan infrastruktur terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya *system adequacy*, meskipun manfaatnya masih lebih banyak pada aspek fisik dibanding peningkatan pendapatan. Model perencanaan partisipatif juga berperan dalam meningkatkan kecukupan. Namun, kapasitas masyarakat yang masih terbatas dalam membedakan kebutuhan dan keinginan menyebabkan sebagian kegiatan kurang tepat sasaran, sehingga *participatory adequacy* belum maksimal.

Pada tingkat kecamatan, kecukupan terlihat dari dukungan administratif dan pembinaan teknis, meski keterbatasan jumlah pendamping menandakan adanya *capacity inadequacy* yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program. Di Kelurahan Burengan, kecukupan program tampak lebih jelas karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur mendukung aktivitas ekonomi warga, terutama bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai wiraswasta. Perbaikan lingkungan dianggap memberikan dampak langsung berupa peningkatan kenyamanan dan mobilitas usaha, mencerminkan *outcome adequacy*. Namun, pada tingkat Pokmas, kecukupan dalam aspek ekonomi belum tercapai sepenuhnya. Pelatihan keterampilan sering hanya menghasilkan *output* berupa peningkatan pengetahuan, tetapi belum diikuti *outcome* berupa usaha berkelanjutan atau peningkatan pendapatan. Keberhasilan ekonomi masih sangat dipengaruhi motivasi dan kemampuan individu. Hanya beberapa inisiatif, seperti “Kampung Keren,” yang menunjukkan kecukupan lebih kuat dalam membuka peluang ekonomi.

Secara keseluruhan, Prodama Plus telah mencapai kecukupan dasar dalam pemenuhan infrastruktur, tetapi belum mencapai kecukupan penuh dalam tujuan utamanya, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Faktor keterbatasan kapasitas warga, ketidakberlanjutan kegiatan ekonomi, dan ketidakmerataan dampak menjadi hambatan utama. Dengan demikian, kecukupan program tergolong *basic adequacy* dan belum sepenuhnya memenuhi *full adequacy* dalam konteks pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Burengan.



**Gambar 3 Kampung Keren di Kelurahan Burengan**

Sumber: Dokumentasi Penulis

### **Kesamaan**

Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), kesamaan (*equity*) merujuk pada sejauh mana manfaat, biaya, dan kesempatan yang dihasilkan dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga harus memperoleh akses yang sama terhadap hasil-hasil kebijakan, tanpa adanya ketimpangan atau diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesamaan dalam Prodama Plus telah diterapkan dengan kuat melalui pemberian dana Rp100 juta per RT yang berlaku merata di seluruh Kota Kediri. Alokasi yang seragam ini menjadi dasar *structural equity* karena memberikan kesempatan setara bagi setiap wilayah untuk mengembangkan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat Kota Kediri, Bappeda menilai bahwa skema ini berhasil membuka akses yang sama bagi seluruh RT dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini mencerminkan tercapainya *equity of access*. Namun, kesetaraan input belum sepenuhnya menjamin kesetaraan output karena keberhasilan pelaksanaan tetap dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan yang benar-benar prioritas. Bagian Pemerintahan Kota Kediri menegaskan bahwa hasil pembangunan fisik juga telah terdistribusi secara merata. Infrastruktur seperti jalan, penerangan, dan sarana umum dirasakan oleh seluruh kelurahan, menunjukkan tercapainya *equity of outcomes* dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di tingkat Kecamatan Pesantren, kesamaan terlihat melalui pelaksanaan rembug warga yang menjamin setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan kebutuhan. Proses perencanaan partisipatif ini sejalan dengan *procedural equity*. Pendampingan administrasi juga dilakukan secara merata di semua kelurahan meskipun terdapat keterbatasan SDM. Di Kelurahan Burengan, kesetaraan manfaat ditunjukkan melalui tersedianya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua warga tanpa biaya. Adanya pengembangan “Kampung Keren” di tiap RT turut membuka peluang usaha yang setara sehingga mencerminkan *equity in opportunity*. Namun, pada tingkat Pokmas, kesamaan hasil ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Meskipun seluruh RT mendapatkan dana dan fasilitas fisik secara merata, peningkatan pendapatan masyarakat tidak merata karena perbedaan keterampilan, motivasi, dan kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan input belum menghasilkan kesetaraan outcome dalam aspek pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, Prodama Plus telah memenuhi prinsip kesamaan dalam alokasi dana, pemerataan pembangunan, dan pemberian kesempatan. Namun, kesetaraan hasil ekonomi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

### **Responsivitas**

Kriteria responsivitas dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) merujuk pada sejauh mana sebuah program mampu menanggapi kebutuhan,

aspirasi, dan harapan masyarakat sebagai kelompok sasaran Responsivitas menjadi indikator penting dalam menilai apakah kebijakan telah benar-benar selaras dengan kepentingan publik, karena kebijakan yang responsif bukan hanya menyelesaikan persoalan, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptif terhadap dinamika kebutuhan warga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prodamas Plus memiliki tingkat responsivitas yang sangat tinggi karena seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Mekanisme *bottom-up planning* melalui rembuk warga dan Musyawarah Kelurahan membuat kegiatan yang dipilih benar-benar mencerminkan kondisi dan prioritas lokal. Hal ini sejalan dengan konsep responsivitas Dunn, yang menekankan kesesuaian antara preferensi masyarakat dan keputusan kebijakan. Responsivitas pemerintah kota terlihat dari berbagai inovasi layanan, seperti Klinik Prodamas Plus yang menjadi ruang konsultasi untuk menyelesaikan kendala teknis maupun administratif secara cepat. Kanal digital seperti SURGA dan Progressio juga memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan laporan, aspirasi, dan memantau perkembangan kegiatan secara transparan. Pemerintah bahkan menyediakan bentuk umpan balik positif melalui *Prodamas Plus Award*, yang berfungsi meningkatkan motivasi kelurahan dan Pokmas dalam mengoptimalkan kinerja program. Pada tingkat kecamatan, responsivitas tampak melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program di kelurahan. Kecamatan menjadi penghubung yang responsif antara kelurahan dan pemerintah kota, termasuk melalui jalur komunikasi cepat seperti layanan “Halo Pak Wali”, yang memungkinkan warga menyampaikan kebutuhan atau keluhan secara langsung.

Responsivitas di tingkat kelurahan terlihat dari cara kelurahan memfasilitasi rembuk warga, memilah usulan berdasarkan prioritas, serta memberikan pendampingan intensif kepada Pokmas agar kegiatan tepat sasaran sesuai aturan. Kelurahan juga cepat merespons ketika terdapat revisi kegiatan atau usulan yang tidak relevan, sehingga pelaksanaan program tetap sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tingkat pelaksana lapangan, Pokmas menunjukkan responsivitas yang kuat melalui koordinasi cepat antara warga dan kelurahan. Hampir seluruh kegiatan lahir dari rembuk warga, dan ketika terjadi hambatan seperti keterlambatan material atau perubahan teknis, Pokmas segera berkomunikasi dengan kelurahan dan biasanya mendapat respons dalam waktu singkat.

Secara keseluruhan, Prodamas Plus dinilai sangat responsif karena mampu menampung aspirasi masyarakat dan menyediakan mekanisme tindak lanjut yang cepat, adaptif, dan terarah. Pola kerja dua arah antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga benar-benar responsif secara substantif terhadap kebutuhan warga. Temuan ini menegaskan bahwa Prodamas Plus telah memenuhi kriteria responsivitas menurut Dunn, sekaligus memperkuat efektivitas dan partisipasi dalam pembangunan tingkat kelurahan.



**Gambar 4 Klinik Prodamas Plus Kota Kediri**

Sumber: Arsip Pemerintah Kota Kediri

### **Ketepatan**

Ketepatan (*appropriateness*) merupakan kriteria terakhir dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003) yang menilai sejauh mana suatu program benar-benar selaras dengan tujuan kebijakan serta tepat dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dunn menegaskan bahwa ketepatan tidak hanya mengukur apakah program dilaksanakan dengan benar, tetapi lebih jauh menilai apakah kebijakan tersebut memang merupakan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi masyarakat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan Prodamas Plus tergolong baik karena seluruh perencanaan kegiatan benar-benar didasarkan pada kebutuhan lokal yang dihimpun melalui rembuk warga dan Muskel. Di tingkat Kota Kediri, Bappeda menjelaskan bahwa program disusun berdasarkan karakteristik masing-masing kelurahan, sehingga wilayah yang memiliki banyak pelaku usaha diarahkan pada pelatihan ekonomi, sedangkan wilayah dengan kebutuhan lingkungan diprioritaskan pada pembangunan fisik. Hal ini menunjukkan ketepatan identifikasi masalah yang sesuai dengan prinsip *appropriateness* menurut Dunn. Bagian Pemerintahan Kota Kediri juga menilai bahwa ketepatan terlihat dari keberlanjutan manfaat program, baik berupa fasilitas umum yang masih digunakan maupun munculnya pelaku usaha baru. Dampak ini dinilai relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga memperkuat kesesuaian antara kebijakan dan persoalan riil masyarakat.

Pada tingkat Kecamatan Pesantren, ketepatan tercermin dari proses validasi usulan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan. Kecamatan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan kelurahan benar-benar berasal dari aspirasi warga. Dengan demikian, ketepatan tidak hanya terjadi pada tahap formulasi kebijakan di tingkat kota, tetapi juga konsisten dijaga pada level koordinasi wilayah. Ketepatan semakin tampak di tingkat Kelurahan Burengan karena kedekatan kelurahan dengan kondisi sosial ekonomi warga memungkinkan identifikasi kebutuhan yang lebih akurat. Mayoritas warga bekerja sebagai wiraswasta, sehingga kelurahan memprioritaskan pelatihan usaha dan perbaikan infrastruktur lingkungan yang menunjang aktivitas ekonomi. Meskipun tidak semua kegiatan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan, arah kebijakan sudah relevan dan memberikan dasar

penting bagi penguatan ekonomi warga. Di tingkat Pokmas, ketepatan terlihat dari manfaat nyata sarana umum dan perbaikan lingkungan yang digunakan warga setiap hari. Program yang bersifat ekonomi, seperti *Kampung Keren*, juga dinilai tepat dalam membuka peluang usaha meski dampaknya belum merata. Ketepatan kegiatan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan warga dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan.

Secara keseluruhan, Prodama Plus dinilai tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat Burengan melalui perencanaan yang berbasis data, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Meskipun peningkatan pendapatan belum merata, kebijakan sudah berada pada arah yang tepat dan menawarkan fondasi yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan konsep Dunn bahwa kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang relevan, sesuai sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodama Plus) di Kelurahan Burengan Kota Kediri menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dari aspek efektivitas, Prodama Plus terbukti mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan warga melalui mekanisme perencanaan bottom-up. Namun, efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat belum optimal karena dampak ekonomi yang muncul masih bersifat individual, tidak merata, serta kurangnya pendampingan lanjutan setelah pelatihan usaha.

Dari sisi efisiensi, tata kelola program berjalan cukup baik melalui penggunaan sistem Progressio, Klinik Prodama Plus, dan koordinasi lintas OPD. Meski demikian, efisiensi di tingkat pelaksanaan masih terkendala oleh keterlambatan pencairan anggaran, waktu pelaksanaan yang sempit, dan beban administratif yang tinggi sehingga beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi tidak berjalan secara maksimal. Pada aspek kecukupan, Prodama Plus dinilai telah cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama terkait infrastruktur dan fasilitas publik, namun kecukupan untuk menjawab tujuan utama peningkatan pendapatan belum terpenuhi karena kegiatan ekonomi belum menghasilkan perubahan signifikan bagi mayoritas warga.

Dalam aspek kesamaan, Prodama Plus berhasil menerapkan pemerataan akses melalui alokasi anggaran Rp100 juta per RT yang berlaku bagi seluruh wilayah tanpa diskriminasi. Manfaat pembangunan fisik juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Meski demikian, kesetaraan hasil ekonomi belum tercapai karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masih bervariasi sehingga manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kecil warga. Responsivitas program tergolong tinggi, terlihat dari beragam kanal aspirasi seperti rembug warga, Muskel, SURGA, Progressio, dan Klinik Prodama Plus yang

memungkinkan pemerintah menindaklanjuti keluhan dan kebutuhan warga secara cepat dan terbuka. Ketepatan program juga dinilai baik karena seluruh kegiatan dirancang sesuai kebutuhan lokal, meskipun ketepatan dalam aspek peningkatan pendapatan belum sepenuhnya tercapai akibat belum terpetakannya potensi ekonomi unggulan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Pemerintah Kota Kediri disarankan melakukan pemetaan mendalam terhadap latar belakang sosial ekonomi setiap kelurahan sebelum rembug warga agar kegiatan pemberdayaan benar-benar sesuai potensi lokal. Mekanisme pencairan anggaran perlu diperbaiki agar kegiatan tidak terlambat, sementara kelurahan dan Pokmas perlu menguatkan perencanaan sejak awal tahun. Kapasitas Pokmas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan swakelola juga perlu ditingkatkan, disertai pendampingan teknis yang lebih intensif dari kelurahan sejak tahap perencanaan. Untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, diperlukan pelatihan usaha yang lebih terarah, pendampingan berkelanjutan, optimalisasi bantuan alat produktif, serta penguatan pemasaran terutama berbasis digital agar produk warga memiliki akses pasar lebih luas. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Prodamas Plus atau program serupa dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kelurahan Burengan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE., Ed.). Syakir Media Press.
- Aliyafi, M. F. (n.d.). *Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Kediri*.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2024). *Kecamatan Pesantren dalam angka 2024*. Kediri: BPS Kota Kediri.
- Diskominfo Kota Kediri. (2022, 1 Februari). *Prodamas Plus, program plus-plus bagi warga Kota Kediri*. Diskominfo Kota Kediri. Diakses 28 Agustus 2025, dari <https://diskominfo.kedirikota.go.id/information/news/656>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nasution. (n.d.). *Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kualitatif*.
- Rahmayanti, A. N. (2024). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Kesejahteraan Sosial Jember*. Universitas Jember.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi kebijakan publik (Konsep dan model)*. Tahta Media Group.
- Setianingsih, N. A., & Setiadi, A. S. P. (n.d.). *Pengaruh Prodamas Plus terhadap peningkatan perekonomian Kota Kediri*.
- Sugiyono. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Susanti, E. (2025a, 11 September). *Pekerja sektor formal di Kediri alami penurunan, kok bisa?* Radar Kediri. Diakses dari <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/783259495/pekerja-sektor-formal-di-kediri-alami-penurunan-kok-bisa>
- Susanti, E. (2025b, 29 Agustus). *UMKM Kota Kediri terus bertambah, sinyal baik untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.* Radar Kediri. Diakses dari <https://radarkediri.jawapos.com/ekonomi/785132892/umkm-kota-kediri-terus-bertambah-sinyal-baik-untuk-mendorong-pertumbuhan-perekonomian-daerah>
- Ussyifa, M. N. (n.d.). *Evaluasi implementasi Prodamas di Kota Kediri.* (Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri).
- Website Resmi Pemerintah Kota Kediri. (2022a). *Seberapa bergantung Kediri terhadap Gudang Garam? Ini gambarannya.* Diakses 11 September 2025, dari <https://www.kedirikota.go.id/p/ekonomi/1087630/seberapa-bergantung-kediri-terhadap-gudang-garam-ini-gambarannya>
- Website Resmi Pemerintah Kota Kediri. (2022b). *Kelurahan Burengan Kota Kediri sabet predikat ketiga kelurahan terbaik Provinsi Jatim 2022.* Diakses 11 September 2025, dari <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/15741/kelurahan-burengan-kota-kediri-sabet-predikat-ketiga-kelurahan-terbaik-provinsi-jatim-2022>
- William, D. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik.* Gadjah Mada University Press.
- Yulistya, G. I., & Rahaju, T. (2023). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (*Prodamas Plus*) pada bidang ekonomi di Kelurahan Bangsal Kota Kediri (Studi pada Koperasi Sehat Sejahtera Erwe 2 Bangsal). *Publika*, 11(2), 1697–1710. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1697-1710>